

**EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI PASCA BENCANA BANJIR
OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI KOTA LANGSA
PROVINSI ACEH**

Cut Fira
NPP. 32.0010

*Asdaf Kota Langsa, Provinsi Aceh
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: firacut533@gmail.com

Pembimbing Skripsi : D. Adam Ismail, S.IP., M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP) : The author focuses on the recurring issue of flooding and the post-disaster rehabilitation programs implemented by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Langsa City in flood-affected areas. **Purpose:** This research aims to assess the effectiveness of the post-flood rehabilitation program conducted in Langsa City and to identify the efforts made. **Methods:** A qualitative descriptive approach with an inductive method was employed. Data collection techniques included interviews, observations, and documentation. The data were analyzed through stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The theory applied is Duncan's Theory of Effectiveness. **Result:** The results of the post-flood disaster rehabilitation program research have been implemented quite effectively, but there are still several obstacles. According to the indicators used by the author, which consist of targets and objectives, facilities and infrastructure, budget, strategies, coordination, and human resources. The inhibiting factors include unoptimized budgets and the low understanding of the community regarding the rehabilitation programs that have been carried out by the government. **Conclusion:** Based on the research, the author recommends that the Langsa City government prioritize budget allocation for the most urgent needs and coordinate with local governments and related agencies to obtain additional assistance from various sources, both from the central government and non-governmental organizations. This collaboration will enable the immediate implementation of rehabilitation programs after a flood disaster, thereby reducing the impact during the flood event. Additionally, there is a need to focus on educating the community to provide understanding and knowledge about the importance of implementing post-flood rehabilitation programs. This approach will enhance the effectiveness of the rehabilitation programs conducted in flood-affected areas.

Keywords: Disaster Management, Floods, Rehabilitation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan banjir yang sering terjadi dan program rehabilitasi pasca bencana banjir yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan bencana Daerah Kota Langsa dilokasi yang terdampak bencana banjir di Kota Langsa. **Tujuan:** Kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program rehabilitasi pasca bencana banjir yang telah dilakukan di kota Langsa, Penelitian ini menggunakan. **Metode:** penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan atau verifikasi. Teori yang digunakan adalah Teori Efektivitas menurut Duncan. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian program rehabilitasi pasca bencana banjir ini telah terlaksana cukup efektif, tetapi masih terdapat beberapa hambatan, Sesuai indikator yang digunakan penulis yang terdiri dari, target dan sasaran, sarana dan prasarana, anggaran, strategi, koordinasi maupun sumberdaya manusia. Factor penghambat antara lain terkait anggaran yang belum dioptimalkan serta rendahnya pemahaman masyarakat terkait program rehabilitasi yang telah dilakukan pemerintah. **Kesimpulan:** Berdasarkan penelitian, penulis menyarankan pemerintah Kota Langsa melakukan prioritas alokasi anggaran untuk kebutuhan yang paling mendesak dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memperoleh bantuan tambahan dari berbagai sumber, baik dari pemerintah pusat maupun organisasi non-pemerintah, agar pelaksanaan program rehabilitasi dapat segera dilaksanakan setelah bencana banjir terjadi, sehingga mengurangi dampak yang ditimbulkan pada saat bencana banjir terjadi. Serta Perlu adanya focus kepada masyarakat untuk memberikan edukasi, pemahaman serta pengetahuan dengan segala cara terkait pentingnya pelaksanaan program rehabilitasi pasca bencana banjir dilakukan. sehingga dapat mengefektifkan program rehabilitasi yang telah dilakukan pada wilayah terdampak bencana banjir.

Kata Kunci: Penanggulangan Bencana, Banjir, Rehabilitasi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dibentuk agar pelaksanaan penanggulangan bencana dapat ditingkatkan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan penanggulangan bencana secara terarah dan terencana, dimulai dari perencanaan prabencana, tanggap darurat atau saat terjadinya bencana dan diakhiri dengan pemulihan pascabencana. Penanggulangan bencana memiliki tujuan agar dapat memberi perlindungan dari ancaman bencana yang dapat mengganggu masyarakat, menyesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang sudah dibuat, memberi jaminan atas diselenggarakannya penanggulangan bencana, dan menciptakan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Kota Langsa merupakan kota yang ada di wilayah Provinsi Aceh yang mana Kota langsa beriklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi di setiap tahunnya. Dengan adanya fenomena tersebut menyebabkan Masyarakat selalu khawatir Ketika terjadi hujan yang cukup deras melanda Kota Langsa dan dapat menyebabkan bebrapa wilyah di Kota Langsa terendam bencana banjir. Banjir masih menjadi salah satu masalah yang sangat penting dan harus ada penanganan dan perhatian yang khusus baik bagi pemerintah ataupun masyarakat.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang baik dapat mengurangi risiko terjadinya suatu bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian upaya berupa menetapkan kebijakan pembangunan yang menimbulkan resiko terjadinya bencana. Penanggulangan bencana ini tidak terlepas oleh peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta pemerintah dan juga masyarakat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Penanggulangan bencn itu sendiri terdiri dar sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana.

Pelaksanaan program rehabilitasi setelah terjadinya suatu bencana banjir harus dilaksanakan dengan baik serta efektif agar hasil yang diharapkan dpat sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Efektivitas dari suatu kelembagaan penanggulangan bencana adalah suatu hal penting dalam melaksanakan suatu kegiatan. Ketika Lembaga itu menjalankan perannya dengan baik dan efektif maka akan berdampak positif bagi bagi orang-orang didalam Lembaga tersebut maupun bagi masyarakat luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektifitas berasal dari kata efektif yang memiliki pengertian pengaruh, akibat, atau mendatangkan hasil. Efektivitas memiliki definisi sebagai kebijaksanaan, kegunaan, dan adanya kesesuaian dalam sekelompok orang yang melaksanakan suatu tugas dan tujuan yang diharapkan.

Program rehabilitasi yang direncanakan serta dilakukan guna menanggulangi bencana banjir yang sering terjadi dilakukan oleh beberapa instansi terkait dan merupakan suatu usaha dalam mengurangi dampak akibat terjadinya bencana banjir di Kota Langsa.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Banjir yang melanda di beberapa wilayah di Kota Langsa disebabkan oleh cuaca yang buruk dengan disertai hujan deras dan memiliki intensitas yang tinggi ditambah dengan drainase yang kurang memadai, sampah yang menumpuk membuat parit tersumbat, dan perumahan yang tidak memiliki saluran pembuangan air. Penyebab lainnya adalah alih fungsi lahan yang sebelumnya lahan difungsikan untuk menampung air ketika hujan turun yang mengalir dari drainase ataupun parit rumah warga kemudian dilakukan pembangunan di atas lahan tersebut membuat tidak ada lagi lahan untuk menampung air ketika hujan turun. Selain itu banjir akibat air laut pasang juga melanda di beberapa wilayah Kota Langsa.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penanggulangan bencana banjir maupun konteks efektivitas. Penelitian Maulana Mufis Mughron, Dyah Hariani, Titik Djumiarti (2015) berjudul Efektivitas BPBD Dalam Pelaksanaan Program Kelurahan Siaga Bencana Di Kota Semarang, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menunjukkan bahwa persamaannya adalah membahas tentang penanggulangan bencana banjir dan juga menggunakan teori efektivitas dalam penelitian ini, persamaannya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, perbedaan penelitian ini lebih fokus membahas efektivitas BPBD dalam menanggulangi

bencana banjir. Penelitian yang dilakukan oleh Putri, A. S. A., Kismartini, & Suwitri, S. (2024) di Kota Tangerang Selatan telah dilaksanakan pada ketiga tahap utama, namun masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan infrastruktur komunikasi. Diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga, edukasi kepada masyarakat, dan alokasi sumber daya yang lebih optimal untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan banjir di masa depan, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu masih terdapat hambatan yaitu kurangnya partisipasi masyarakat.

Penelitian Sigarlaki, N. T., Sambiran, S., & Lambey, T. (2017) yang berjudul Implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi korban banjir di Kota Manado menunjukkan bahwa Implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi di Kecamatan Paal Dua belum sepenuhnya efektif. Diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi terkait, transparansi informasi, dan pemerataan distribusi bantuan untuk mencapai tujuan pemulihan yang optimal. Penelitian Muhammad Atshil Muqtasyim Prima (2023) berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir di Kota Langsa Provinsi Aceh, penelitian ini menggunakan metode penelitian deksriptif kualitatif yang berisikan mengenai Upaya pemerintah Kota Langsa dalam penanggulangan banjir salah satunya adalah Dibentuknya forum PRB oleh BPBD untuk membantu proses kegiatan penanggulangan bencana di Kota Langsa Provinsi Aceh. Hal ini dibuat agar penanggulangan banjir di Kota Langsa berjalan secara optimal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah terletak pada fokus penelitiannya yaitu implementasi kebijakan sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas program rehabilitasi. Lalu terdapat penelitian oleh Siti Muthmainnah (2022) yang berjudul Efektivitas Penanggulangan Bencana Kebakaran Permukiman di Kota Langsa Provinsi Aceh, yang mana pada penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan hasil penelitian ialah Penanggulangan bencana kebakaran permukiman di Kota Langsa Provinsi Aceh masih belum efektif dilihat dari kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya integrasi antar lembaga terkait penanggulangan bencana kebakaran, serta belum adanya tenaga ahli di dalam BPBD Kota Langsa, dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah terletak pada focus penelitiannya. Yang mana pada penelitian terdahulu berfokus pada penaggulangan bencana kebakaran pemukiman, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada program rehabilitasi pasca bencana banjir.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Dalam pelaksanaanya peneliti mangacu pada konteks efektivitas menurut duncan dalam melakukan pengembangan yang dilandasi dengan undang- undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Selain itu penulis juga menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:247-252). Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, Dimana penelitian ini berfokus kepada efektivitas program rehabilitasi pasca bencana banjir oleh BPBD sebagai organisasi yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah Kota Langsa untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Langsa. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih focus kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait penanggulangan bencana, dan proses penanggulangan bencana kebakaran pemukiman. Penelitian ini tidak hanya menilai tingkat efektivitas program, tetapi juga mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta memberikan rekomendasi yang kontekstual dan

aplikatif untuk perbaikan di masa depan. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi BPBD Kota Langsa dan pihak terkait dalam merancang dan melaksanakan program rehabilitasi yang lebih efektif dan efisien.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana efektivitas program rehabilitasi pasca bencana banjir yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa di Kota Langsa. Lebih lanjut, penelitian ini juga ditunjukkan untuk mengetahui upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa dalam melakukan program rehabilitasi pasca bencana banjir yang terjadi di Kota Langsa.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang mana Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif karena ingin memfokuskan pada sebuah pengamatan secara mendalam, untuk dapat mendeskripsikan situasi nyata yang ada di lapangan dengan mengumpulkan data, yang kemudian digunakan untuk memahami masalah yang dihadapi di lapangan. Dengan demikian, metode penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan temuan dengan cara yang teratur, akurat, dan sesuai dengan situasi yang ada di lapangan. Selanjutnya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini juga dapat ditarik Kesimpulan yang bersifat umum dalam proses penanggulangan bencana banjir. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder di mana sumber data primer, data yang peneliti peroleh dari tanya jawab langsung kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa terkait program rehabilitasi pasca bencana banjir yang telah dilaksanakan di Kota Langsa. Sedangkan sumber data sekunder, peneliti dapat memperoleh data melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum peneliti melakukan penelitian ini, data yang diperoleh seperti dari jurnal tentang penanggulangan bencana, buku-buku dan dari media lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Langsa, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa, Kepala Seksi Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa, Geuchik Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota dan 5 Masyarakat. Informan penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive Sampling, yaitu Teknik mengumpulkan sampel dengan menggunakan pertimbangan. Informan yang dipilih harus dapat dipercaya dan juga mengetahui objek yang diteliti oleh peneliti berdasarkan dengan Tingkat pengetahuannya mengenai permasalahan yang peneliti jadikan objek dalam penelitiannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Program Rehabilitasi Pasca Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kota Langsa Perspektif Teoritis

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Langsa telah lama menjadi perhatian oleh Pemerintah Kota Langsa. hal itu terbukti dengan adanya Qonun Kota Langsa Nomor 18 Tahun 2010 dan diperbarui dengan Qonun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Langsa, yang mendasari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Langsa, selain itu terdapat pula Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 yang berisikan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Langsa.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Langsa memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Langsa. seperti melaksanakan, memfasilitasi, dan melakukan pengkoordinasian kepada pihak-pihak terkait agar pada saat melakukan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik, mulai dari pra, tanggap darurat sampai pasca bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penanggulangan bencana yang ada di Kota Langsa, yang dalam hal ini ialah bencana banjir. Kondisi topografi kota Langsa sebagian besar adalah Area yang dianggap sensitif terhadap banjir, terutama di daerah pusat perkotaan. yang diakibatkan oleh wilayah kota langsa yang tergolong kedalam datran rendah. kota langsa juga termasuk kedalam daerah dengan kondisi drainase yang buruk, dan juga tergolong kedalam daerah yang beradadi sekitar aliran sungai (DAS). Secara umum, bencana banjir sering terjadi di daerah perkotaan ketika curah hujan tinggi, tetapi drainase tidak berfungsi secara optimal karena kapasitas drainase yang terbatas. Bencana banjir harus segera ditanggulangi dengan pertimbangan dampak buruk pada aktivitas sosial ekonomi dan juga menimbulkan kerusakan pada infrastruktur perkotaan. Untuk menjadikan masyarakat segera pulih tentunya harus dilakukan perbaikan infrastruktur seperti menurut Marsoyo (2017) bahwa untuk segera memulihkan kondisi masyarakat diperlukan pembangunan kembali infrastruktur yang kuat. Oleh karena itu, Penelitian ini difokuskan pada fase Rehabilitasi pasca bencana banjir. Yang mana Rehabilitasi bencana pasca bencana banjir ini bertujuan untuk memperbaiki setiap aspek layanan publik atau masyarakat sampai pada tahap yang lebih baik pada daerah yang terkena bencana dengan tujuan agar semua aspek kehidupan pemerintah dan masyarakat di daerah yang terdampak bencana dapat berjalan normal Kembali.

3.1.1 Tercapainya Target dan Sasaran Program Rehabilitasi Pasca Bencana Banjir

Faktor dari efektif atau tidaknya suatu kegiatan dilaksanakan ialah didasarkan pada pencapaian tujuan, apakah pencapaian tujuan tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Dalam hal ini, selama melakukan observasi secara langsung dilapangan penulis mengacu pada teori Efektivitas Duncan. Yang mana penulis menentukan indikator dari dimensi Pencapaian Tujuan yaitu tercapainya target terhadap proses Rehabilitasi pasca bencana banjir dan ketepatan waktu dalam rehabilitasi pasca bencana banjir. Program Reahabilitasi Pasca bencana banjir yang telah dilaksanakan berdasarkan evaluasi yang telah didata sudah dilakukan dengan baik, sehingga pada saat bencana banjir Kembali terjadi, kapasitasnya tidak sebesar yang sebelumnya. Dalam melaksanakan program rehabilitasi pasca bencana banjir harus dapat memahami target serta sasaran yang telah dibuat sebelumnya. Dan untuk mencapai target dan sasaran tersebut seluruh pihak harus mampu menggunakan segala kemampuan yang ada, mulai dari kemampuasn berkoordinasi sampai penggunaan sarana serta prasarana untuk mempermudah proses pelaksanaan dari target dan sasaran tersebut, baik target atau sasaran program rehabilitasi pasca bencana banjir yang dilaksanakan sudah cukup baik. Beberapa Lokasi yang terkena bencana banjir yang disebabkan oleh siste drainase ataupun tanggul yang bocor sudah dinormalisasikan Kembali sehingga kehidupan dan penghiupan masyarakat yang terkena dampak bencana banjir sudah berjalan Kembali normal.

3.1.2 Sarana dan Prasarana

Dalam berjalannya sebuah kolaborasi diperlukan adanya kepercayaan dari masing-masing pihak. Pihak-pihak yang membangun sebuah relasi dalam kolaborasi perlu untuk saling membangun kepercayaan dikarenakan semakin tinggi tingkat kepercayaan tiap pihak, maka akan semakin tinggi pula tingkat keberhasilan kolaborasi yang akan dilaksanakan dalam hal ini kolaborasi terkait pengurangan risiko bencana. Hal ini sesuai dengan pola hubungan pada umumnya dimana apabila dalam sebuah hubungan tidak terbangun kepercayaan yang baik di antara pihak yang terkait, maka hubungan tidak akan berlangsung lama dan tidak akan berjalan

dengan baik. Maka berdasarkan hal tersebut, perangkat daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu untuk membangun suatu kepercayaan antar perangkat daerah dengan pihak lain yang terlibat salah satunya adalah media massa dan masyarakat. Hal ini bermakna agar hubungan kolaborasi yang terjalin dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya rasa curiga antar pihak yang mana akan menimbulkan kecurigaan dan perselisihan. Sarana dan prasarana merupakan salah satu hal yang penting dalam mendukung kegiatan rehabilitasi. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, dapat berfungsi sebagai pendukung kegiatan rehabilitasi pasca banjir, sehingga masyarakat maupun lingkungan dapat pulih dan berjalan dengan normal Kembali. Sarana dan prasarana yang ada di BPBD sudah cukup memadai untuk pelaksanaan program rehabilitasi dan mendukung kinerja petugas yang melaksanakan tugasnya. Sarana dan prasarana yang ada di Kantor BPBD Kota Langsa dalam menunjang program rehabilitasi, seperti fasilitas yang ada sudah cukup memadai, dan jumlahnya juga sudah ideal sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat menjalankan tugas menghadapi program rehabilitasi pasca bencana banjir terjadi. Berdasarkan dari hasil observasi, wawancara dan juga atas yang ada dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup memadai dalam pelaksanaan kegiatan.

3.1.3 Kemampuan Anggaran

Kemampuan anggaran dalam kegiatan rehabilitasi pasca bencana banjir di Kota Langsa menjadi hal yang paling penting untuk mendukung dan membantu terselenggaranya pelaksanaan rehabilitasi tersebut. Anggaran yang tersedia untuk operasional pelaksanaan rehabilitasi untuk mengatasi dampak bencana banjir belum cukup memenuhi, walaupun Masih terdapat beberapa kendala anggaran, yang Dimana pemerintah lebih memprioritaskan anggaran untuk Pembangunan, Pendidikan dan lain sebagainya, alih-alih pada proyek mengenai rehabilitasi, sehingga kemampuan anggaran yang tersedia belum cukup baik untuk kebutuhan yang dilakukan dalam proses rehabilitasi. Untuk memperbaiki satu drainase saja dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencairkan dana anggaran yang sudah diajukan sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Langsa melakukan prioritas alokasi anggaran untuk kebutuhan yang paling mendesak dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memperoleh bantuan tambahan dari berbagai sumber, baik dari pemerintah pusat maupun organisasi non-pemerintah, menurut Ansell, C., & Gash, A. (2007) keberhasilan *collaborative governance* bergantung pada kondisi awal yang mendukung, desain institusional yang tepat, kepemimpinan yang efektif, dan proses kolaborasi yang membangun kepercayaan serta komitmen. Model kontinjensi yang dikembangkan dapat menjadi panduan bagi praktisi dan peneliti dalam merancang dan mengevaluasi inisiatif kolaboratif agar pelaksanaan program rehabilitasi dapat segera dilaksanakan setelah bencana banjir terjadi, sehingga mengurangi dampak yang ditimbulkan pada saat bencana banjir terjadi.

3.1.4 Strategi

Suatu proses pelaksanaan yang sukses memerlukan adanya konsep perencanaan yang strategis dan jelas. Merencanakan suatu program rehabilitasi pasca banjir yang ada di Kota Langsa juga termasuk perencanaan yang bertujuan untuk tercapainya penanganan dampak bencana banjir yang dapat memulihkan korban-korban yang terkena dampak dari bencana banjir. Strategi yang digunakan dalam mencapai sasaran Badan penanggulangan Bencana Daerah agar tujuan serta sasaran dapat dicapai ialah dengan segera mengembalikan kondisi lingkungan yang kacau seperti semula. Yang mana tidak hanya dilakukan pada lingkungan fisik saja tetapi korban yang terkena bencana harus segera diberikan pemulihan baik fisik maupun mental. Dalam pelaksanaan rehabilitasi segera dimulai perancangan tata ruang daerah. Dari hasil perencanaan tata ruang diharapkan dapat memberikan kepercayaan dan melibatkan

seluruh komponen masyarakat yang utamanya korban bencana. Dalam hal ini mulai disusun juga pengelolaan lingkungan dan pos komando yang mulai dititik beratkan pada kegiatan pendampingan.

3.1.5 Koordinasi

Program rehabilitasi tidak hanya menjadi tanggung jawab dan dilakukan oleh pihak BPBD saja, akan tetapi dibutuhkan juga pihak-pihak lain yang ikut berpartisipasi agar proses rehabilitasi dapat berjalan dengan baik. Beberapa pihak yang dibutuhkan sangat membantu dalam proses rehabilitasi. dalam pelaksanaan program rehabilitasi setelah terjadinya bencana banjir, diperlukan bantuan dari beberapa pihak dalam proses pelaksanaannya. Beberapa pihak itu meliputi pemerintah, organisasi non pemerintah, dan swasta yang dapat membantu dalam pelaksanaan rehabilitasi pasca banjir. menurut Wan Mohd Rani (2017) pemulihan pasca-bencana, khususnya setelah banjir besar. Penulis menekankan bahwa pemulihan yang efektif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan integrasi elemen pengurangan risiko bencana dalam perencanaan, desain, konstruksi, dan operasi lingkungan binaan. Oleh karena itu, koordinasi serta Kerjasama yang dijalin antar stakeholder tersebut sangat penting untuk dijaga, agar pada saat melakukan rehabilitasi dapat berjalan dengan baik. Menurut Sigarlaki, N. T., Sambiran, S., & Lambey, T. (2017) tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana, adalah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah maupun masyarakat. BPBD senantiasa harus menjai garda terdepan untuk mengawal proses penyelenggaraan rehabilitasi yang melibatkan Lembaga pemerintah maupun nonpemerintahmasyarakat. Dimana koordinasi sudah dimulai sejak tahap perencanaan memulai kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna), rencana rehabilitasi dan rekonstruksi (R3P) dilaksanakan oleh masing-masing perangkat sesuai dengan dokumen yang telah disepakati. Serta BPBD juga berperan aktif dalam mengawal pelaksanaannya serta melakukan monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, pelaksanaan proses rehabilitasi pasca bencana banjir tidak hanya menadi tanggung jawab dari BPBD saja, tetapi juga ada campur tangan dari beberapa pihak terkait lainnya. Menurut Sigarlaki (2017) untuk mencapai tujuan pemulihan yang optimal Diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi terkait, transparansi informasi, dan pemerataan distribusi bantuan, Kemudian jika koordinasi tersebut telah berjalan dengan baik maka pada saat pelaksanaan rehabilitasi setelah terjadinya banjir dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif.

3.1.6 Sumber Daya Manusia

Rajeev (2014) mengatakan bahwa Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam manajemen bencana sebagai strategi untuk membangun ketahanan dan keberlanjutan pasca-bencana. Rajeev mengemukakan bahwa masyarakat berada di garis depan dalam menghadapi bencana alam, dan memberdayakan mereka dengan alat dan metode pengurangan risiko bencana adalah langkah penting untuk menghadapi potensi risiko di masa depan.

Pemberdayaan komunitas merupakan bentuk pengembangan kapasitas di mana anggota masyarakat menentukan tujuan dan strategi manajemen risiko bencana, berkontribusi pada sumber daya yang diperlukan, dan memantau kinerja mereka. Elemen-elemen umum dari keterlibatan komunitas meliputi kemitraan, partisipasi, pemberdayaan, dan kepemilikan oleh masyarakat lokal. Tanpa keberlanjutan dalam upaya manajemen bencana di tingkat individu dan komunitas, sulit untuk mengurangi kerugian dan skala tragedi.

Keberadaan masyarakat memiliki peran yang sangat penting pada saat pelaksanaan program rehabilitasi. Oleh karena itu masyarakat penting untuk diberikan pengetahuan mengenai rehabilitasi. saat ini masyarakat diKota Langsa masih banyak yang belum memahami terkait pentingnya pelaksanaan rehabilitasi setelah bencana, banjir terjadi. Selain itu masih

adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada BPBD Sehingga sedikit mempersulit kami pada saat ingin melakukan rehabilitasi. Menurut Hamid (2021) Melalui pendekatan berbasis komunitas dan pemberdayaan lokal, masyarakat tidak hanya pulih dari dampak bencana tetapi juga menjadi lebih siap dan tangguh menghadapi potensi bencana di masa depan. Menurut Sriharyati (2021) Peran Komunikasi Persuasif sangat penting, yang mana Komunikasi persuasif terbukti efektif dalam membangun kesadaran dan motivasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Sehingga dapat disimpulkan bahwa BPBD harus melakukan banyak edukasi dan membangun komunikasi yang baik kepada masyarakat terkait pentingnya rehabilitasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPBD guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait rehabilitasi. Seperti menurut Serrao-Neumann (2018) Masyarakat lokal dan relawan memainkan peran penting dalam proses pemulihan sosial, dengan kontribusi signifikan dalam membangun kembali struktur sosial dan dukungan emosional bagi korban.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

penelitian ini memberikan kontribusi baru pada pengetahuan tentang efektivitas program rehabilitasi pasca bencana banjir terjadi, khususnya dalam konteks mengatasi dampak akibat terjadinya bencana banjir. Sebagaimana telah dianalisis menggunakan Teori efektivitas menurut Duncan (dalam Steers 1985;53) menunjukkan bahwa efektivitas program rehabilitasi pasca bencana banjir sudah efektif tetapi masih harus ditingkatkan lagi. salah satu temuan penting adalah bahwa masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai program rehabilitasi, sehingga perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat mau berperan aktif dalam program rehabilitasi yang dilakukan pemerintah.

Temuan ini memperkuat penelitian M. Rajeev (2014) yang membahas pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam manajemen bencana untuk mencapai keberlanjutan. Rajeev menekankan bahwa masyarakat yang diberdayakan memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi risiko, merencanakan mitigasi, dan memimpin proses pemulihan pasca-bencana. penelitian ini menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam semua tahap manajemen bencana. Di Kota Langsa, BPBD telah melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan rehabilitasi pasca-bencana, seperti perbaikan infrastruktur dan pemulihan sosial ekonomi. Peningkatan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program rehabilitasi dengan memastikan bahwa kebutuhan dan prioritas masyarakat terakomodasi. Sedangkan menurut Serrao-Neumann dkk. (2018) menyoroti pentingnya peran masyarakat, relawan, dan pemerintah dalam pemulihan sosial pasca-bencana, yang mana menekankan pentingnya penerapan prinsip kemandirian dan tanggung jawab bersama dalam manajemen risiko bencana. Di Kota Langsa, meskipun terdapat kebijakan yang legal berupa Qanun nomor 18 tahun 2010 yang membentuk tim penanggulangan bencana, implementasinya masih menghadapi tantangan. Kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara pihak terkait menyebabkan informasi mengenai bencana tidak dapat tersebar dengan luas dan cepat.

Temuan ini juga mendukung penelitian Ernest Dube dkk. (2021) yang juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip Building-Back-Better (BBB) dalam pemulihan pasca-bencana untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya kembali ke kondisi semula, tetapi juga menjadi lebih kuat dan siap menghadapi potensi bencana di masa depan. Pentingnya pelatihan pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan dan investasi dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan juga ditekankan untuk meningkatkan ketahanan. Karena, Pelatihan yang tidak rutin dan kurangnya pendanaan dapat menghambat upaya pemulihan yang efektif.

Secara umum, Temuan dari penelitian ini memberikan wawasan penting untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi pasca-bencana banjir oleh BPBD Kota Langsa. Penting untuk memperkuat peran komunitas dan relawan, serta menerapkan prinsip

kemandirian dan tanggung jawab bersama dalam manajemen risiko bencana. Selain itu, kolaborasi yang lebih baik antara BPBD dan berbagai pemangku kepentingan perlu ditingkatkan untuk memastikan pemulihan sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa semua kegiatan program rehabilitasi pasca bencana banjir di Kota Langsa yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah berjalan dengan baik, namun masih ada yang perlu ditingkatkan yaitu baik pengalokasian anggaran yang lebih terarah maupun pengetahuan masyarakat yang perlu ditingkatkan. Hal tersebut dibuktikan dengan program-program yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Langsa dengan bekerjasama beberapa instansi dan juga beberapa pihak yang juga memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap program rehabilitasi pasca bencana banjir di Kota Langsa.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas yaitu hanya 14 hari. Kemudian penelitian ini juga hanya berfokus pada program rehabilitasi pasca bencana banjir yang dilakukan oleh pemerintah.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis memfokuskan hasil penelitian terkait dengan bagaimana masyarakat dapat membantu dan mendukung program rehabilitasi pasca bencana banjir yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa yang diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan juga pemerintah daerah kedepannya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, seluruh Staff Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa dan Geuchik Gampong Teungoh yang telah memberikan kesempatan dan banyak memberikan bantuan kepada saya untuk dapat melaksanakan penelitian ini sehingga dapat berjalan dengan lancar, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Serrao-Neumann, S., Crick, F., & Low Choy, D. (2018). Post-disaster social recovery: Disaster governance lessons learnt from Tropical Cyclone Yasi. *Natural Hazards*, 93(3), 1163–1180. <https://doi.org/10.1007/s11069-018-3345-5>
- Sigarlaki, N. T., Sambiran, S., & Lambey, T. (2017). Implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi korban banjir di Kota Manado (Studi di Kecamatan Paal Dua). *Jurnal Eksekutif*, 1(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16793>
- Wahyuni, I., Aziz, F., & Budiharto, T. (2023). Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Utara. *Journal of Urban Planning Studies*, 2(2), 198–207. <https://doi.org/10.35965/jups.v2i2.297>
- Dube, E., Wedawatta, G., & Ginige, K. (2021). Building-back-better in post-disaster recovery: Lessons learnt from cyclone Idai-induced floods in Zimbabwe. *International Journal of Disaster Risk Science*, 12(3), 318–329. <https://doi.org/10.1007/s13753-021-00373-3>

- Sriharyati, S., Siagawati, M., & Reniawaty, D. (2021). Strategi Komunikasi Persuasif Pendampingan Masyarakat Dalam Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Sektor Permukiman Pasca Bencana Banjir (Studi Deskriptif Masyarakat Korban Banjir Di Sepanjang DAS Cimanuk Kabupaten Garut). *Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi*, 17(2), 109–119. Retrieved from <https://journal.widyatama.ac.id/index.php/jbme/article/view/604>
- Hamid, R. S., Salju, S., Suharnita, S., Pelandira, P., Fadillah, N., Lusi, N., & Ruddin, D. R. (2021). KKN Kebencanaan: Desa tangguh bencana sebagai upaya pemulihan ekonomi dan kondisi sosial pasca banjir bandang. *Martabe : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 306–312. <https://doi.org/10.31604/jpm.v4i1.306-312>
- Rajeev. (2014). Sustainability and Community Empowerment in Disaster Management. *International Journal of Social Work and Human Services Practice Vol.2. No.6*, 207-212. <https://doi.org/10.13189/ijrh.2014.020601>
- Putri, A. S. A., Kismartini, & Suwitri, S. (2024). Manajemen bencana (tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana) dalam penanggulangan banjir di Kota Tangerang Selatan. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 1–15. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i3.44991>
- Sigarlaki, N. T., Sambiran, S., & Lambey, T. (2017). Implementasi program rehabilitasi dan rekonstruksi korban banjir di Kota Manado (Studi di Kecamatan Paal Dua). *Jurnal Eksekutif*, 1(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16793>
- Marsoyo, A. (2016). Rumah inti untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana bagi masyarakat pedesaan. *Unisia*, 30(63), 15–23. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss63.art2>
- Wan Mohd Rani, W., Faizatul Akmar, A. N., Ismail, M. N., & Khairin Norhashidah, K. (2017). Planning for post-disaster recovery: Lessons learnt from flood events in Kelantan, Malaysia. *AIP Conference Proceedings*, 1891(1), 020143. <https://doi.org/10.1063/1.5005373>

Peraturan

UU RI No. 24 Tahun 2007 *Tentang Penanggulangan Bencana*

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 *Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*

Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2008 *Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 *Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 *Tentang Perangkat Daerah*

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 *Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana*

Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2010 *Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa*

